

Evaluasi Dampak Kebijakan Program Jombang Berkadang di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Program Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting

Evaluation of the Impact of the Jombang Berkadang Program Policy in Keras Village, Diwek District, Jombang Regency in the Priority Program for Stunting Reduction and Prevention

Dea Alifviya, Yuni Lestari

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email: yunilestari@unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email: dea.21075@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kondisi anak lebih pendek dibandingkan usia sebayanya dan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan kecerdasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang per Februari 2024, angka prevalensi stunting mencapai 4,46 persen, menunjukkan penurunan dari 6,29 persen pada tahun 2023. Program intervensi yang dilakukan meliputi Taman Pemulihan Gizi (TPG), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan gizi, serta sosialisasi edukasi yang melibatkan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting. Beberapa keluarga penerima bantuan belum sepenuhnya memahami cara merawat dan memenuhi kebutuhan gizi anak secara tepat, meskipun intervensi telah didistribusikan secara cepat dan menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi, sosialisasi yang lebih intensif, dan pendekatan partisipatif agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjawab permasalahan kesehatan anak di Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kabupaten Jombang, dengan fokus pada evaluasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022. Salah satu tujuan program yaitu Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu peneliti meneliti terkait adanya dampak dari kebijakan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data berdasarkan model evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang meliputi enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan serupa di masa depan dan menghasilkan strategi inovatif dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan program jombang berkadang.

Kata Kunci: *Stunting*, kebijakan publik, evaluasi kebijakan, evaluasi program

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem characterized by a child being shorter than their peers and can have long-term impacts on health and intellectual development. Based on data from the Jombang Regency Health Office as of February 2024, the prevalence rate of stunting reached 4.46 percent, showing a decrease from 6.29 percent in 2023. The

intervention programs carried out include Nutrition Recovery Parks (TPG), Additional Food Provision (PMT), nutritional assistance, and educational socialization involving cross-sectors. The results of the study showed that there is still a lack of public understanding and awareness regarding the importance of preventing stunting. Several families receiving assistance do not fully understand how to care for and meet children's nutritional needs properly, even though the intervention has been distributed quickly and comprehensively. This study recommends strengthening education, more intensive socialization, and a participatory approach so that the stunting management program can run more effectively and sustainably in addressing children's health problems in Jombang Regency. This study aims to evaluate the impact of the Jombang Character and Competitive Program policy implemented by Keras Village Jombang Regency, with a focus on the evaluation of Jombang Regent Regulation Number 1 of 2022. One of the objectives of the program is the Prevention and Management of Malnutrition and Stunting as explained in Jombang Regent Regulation Number 1 of 2022, therefore researchers examine the impact of the program policy. This study uses a descriptive qualitative approach with data analysis based on William N. Dunn's policy evaluation model, which includes six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Through interviews, observations, and documentation. The results of the study are expected to provide input for improving similar policies in the future and produce innovative strategies in realizing the success of the Jombang Berkadang program policy.

Keywords: Stunting, public policy, policy evaluation, program evaluation

Pendahuluan

Kebijakan atau policy merupakan rangkaian konsep yang menjadi panduan, aturan, atau peraturan dalam pengambilan keputusan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu serta memecahkan masalah yang sedang dihadapi, Menurut (Muhadjir, 2000) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan, peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya (Anderson, 1979) menyatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Dalam pemerintahan Indonesia saat ini kebijakan diurutkan berdasarkan jenis, fungsi, dan hierarki yang berkaitan dengan kekuatan hukum dari kebijakan tersebut, sebelum terbentuknya kebijakan publik daerah terdapat kebijakan atau peraturan presiden yang menjadi acuan dalam pelaksanaan terhadap kebijakan daerah, salah satu bentuk peraturan presiden yang menjadi implementasi dari peraturan daerah ialah Peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dijelaskan dalam Perpres tersebut terkait pelaksanaan dalam penurunan stunting yang menjadikan acuan untuk pembentukan dan pelaksanaan dari kebijakan daerah.

Salah satu bentuk kebijakan publik daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 adalah kebijakan Program Jombang Berkadang (Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing), yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2018–2023. Program ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jombang 2018–2023, dan bertujuan mempercepat penurunan kemiskinan di desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memantapkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya.

Program ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkadang Tahun 2023. Implementasinya melibatkan berbagai elemen pemerintahan daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala seksi pemerintahan desa, kepala desa, dan perangkatnya. Pada pelaksanaannya Program Jombang Berkarakter dan Berdaya saing ini terdapat beberapa menu yaitu Pembangunan MCK Individual, Pengadaan Infrastruktur SPBE dalam rangka mendukung digitalisasi layanan tingkat Desa, Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting, Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu), Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD (TK/RA/KB) baik negeri maupun swasta, Fasilitasi Bersih Desa/ Tasyakuran Desa/ PHBN/PHBA, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa, Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Prasarana Pendukungnya serta Pengadaan Sarana Tempat Ibadah, Fasilitasi Alat Bantu Bagi Disabilitas, Gerakan masal pengendalian OPT Tikus, Bantuan Pupuk organik/ bokashi/ kompos, Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Pembangunan sumur dangkal, Fasilitasi Sarana Usaha bagi Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan, Pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi pelaku usaha mikro.

Implementasi jombang berkadang di Kabupaten Jombang salah satu nya yaitu Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022, stunting merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam jangka waktu lama, dimulai sejak masa kehamilan. Penilaian terhadap stunting dilakukan melalui pengukuran antropometri, yaitu berdasarkan panjang atau tinggi badan anak sesuai usianya. Anak yang mengalami stunting biasanya tampak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Jika stunting tidak segera diatasi, maka permasalahan ini akan berakibat menjadi permasalahan lainnya pada anak. Dalam penanganan pelaksanaan dilakukan karena berdasarkan data dari dinas kesehatan Kabupaten Jombang per february 2024 angka prevalensi stunting di Kabupaten Jombang berdasarkan data EPPGBM mencapai 4,46 persen, angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6,29 persen. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Jombang menjadi tantangan penting, karena pemahaman yang baik sangat dibutuhkan agar intervensi yang sudah dilakukan pemerintah bisa diterima dan dijalankan secara optimal oleh keluarga sasaran.

Pemerintah kabupaten jombang terus berusaha untuk mengurangi atau menurunkan jumlah anak yang terkena stunting melalui program jombang berkadang menggunakan program bantuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, adanya bantuan ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting lebih banyak lagi serta lebih mengedukasi masyarakat dalam pentingnya pencegahan serta penanganan anak

jika terkena stunting. Setelah pelaksanaannya selama kurang lebih satu tahun, Program Jombang Berkadang ini tak lagi direalisasikan di 2024 karena adanya perubahan bupati maka program ini di tiadakan atau dihentikan Pj Bupati Jombang Sugiat. Alis Asmaun menulis artikel yang menyebutkan bahwa sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Jombang yaitu Agus Purnomo mengatakan “Jombang Berkadang tahun 2024 sudah tidak ada lagi, itu kan dulu sesuai visi misi RPJMD. Sekarang diganti Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK),” yang dimana program Jombang Berkadang ini merupakan visi dan misi dari bupati sebelumnya, sebelum dilaksanakan pilkada 2024.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menganggap bahwa penurunan angka stunting di Kabupaten Jombang tidak terlepas dari kontribusi Program Jombang Berkadang melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022. Program ini dinilai berhasil menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting dalam waktu relatif singkat. Salah satu contoh nyata keberhasilan ini dapat dilihat di Desa Keras, Kecamatan Diwek. Desa Keras menjadi salah satu lokus prioritas pelaksanaan program, dengan berbagai intervensi seperti Taman Pemulihan Gizi (TPG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Data menunjukkan bahwa jumlah anak stunting di Desa Keras turun drastis dari 100 anak pada tahun 2022 menjadi 43 anak pada 2023, dan hanya 20 anak pada 2024. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas bantuan yang diberikan, tetapi juga menunjukkan bahwa strategi program yang berbasis data dan kebutuhan lokal dapat diimplementasikan dengan baik hingga tingkat desa.

Oleh karena itu, penghentian program tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan upaya penanggulangan stunting di Jombang, termasuk keberhasilan yang sudah dicapai di Desa Keras dan penting untuk dilakukan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan Program Jombang Berkadang, khususnya dalam penurunan stunting sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan program penanggulangan stunting di masa mendatang, baik di Kabupaten Jombang maupun di daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dengan mengeksplorasi pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa dalam konteks alamiah (Moleong, 2019). Penelitian ini bersifat memaparkan dan mengevaluasi kebijakan yang dimana di dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh adalah kata-kata, kalimat atau suatu gambar yang mempunyai arti dan diarahkan pada pendeskripsian rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenar benarnya terjadi di lapangan studi.

Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana dampak kebijakan Program

Jombang Berkadang, khususnya dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Jombang. Fokus pada penelitian ini adalah Evaluasi dampak kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kabupaten Jombang ini dianalisis menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William N.Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, evaluasi ini dilakukan dengan melihat pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022. Informan yang ada dalam penelitian ini mencakup berbagai unsur yang nanti akan menuntun peneliti untuk menemukan data yang benar sesuai dengan situasi yang terjadi di lokasi penelitian terkait program Jombang Berkadang. Dengan demikian peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat apa adanya pada saat perolehan data yang membuat hasilnya lebih menekankan pada situasi yang sebenar benarnya agar dapat mendapatkan hasil evaluasi dari suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi yaitu terkait Evaluasi dampak kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kabupaten Jombang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti untuk meneliti Evaluasi dampak kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kabupaten Jombang ini dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Evaluasi dampak kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kabupaten Jombang Penulis menggunakan teknik analisis data yang berkaitan dengan data di lapangan yang benar benar sedang terjadi. Analisis data dilakukan berdasarkan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, data reduction, dan display, dan conclusion verification.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dalam penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Jombang dengan menggunakan pendekatan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William n Dunn dalam (Subarsono 2011) dari Evaluasi Dampak Kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Program prioritas penurunan dan pencegahan stunting. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Tim Percepatan Penurunan Stunting/TPPS) dan dua masyarakat penerima manfaat serta analisis data prevalensi stunting 2022–2024. Menggunakan indikator untuk memetakan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program, menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka evaluasi

kebijakan publik.

a) Efektifitas

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari Evaluasi dampak dari kebijakan Jombang Berkadang dalam penurunan angka stunting ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, hal ini juga sesuai dengan teori Will Dunn dalam (Subarsono, 2011) yang dimana efektivitas mengukur sejauh mana tujuan program tercapai. Program Jombang Berkadang dalam penurunan dan pencegahan gizi buruk dan stunting ini diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022, yang melibatkan intervensi seperti Taman Pemulihan Gizi (TPG), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pendampingan gizi. Program intervensi dilaksanakan dengan anggaran hingga Rp200 juta per desa per tahun (minimal Rp20 juta untuk stunting). Bappeda menyatakan bahwa program ini berhasil menurunkan prevalensi stunting, didukung oleh Dinas Kesehatan yang menyebut TPG dan PMT terbukti efektif berdasarkan data EPPGBM yang menunjukkan pencapaian target penurunan stunting sebesar 4,3% pada 2022 dan 2023 secara keseluruhan Kabupaten Jombang.

Desa Keras sebagai salah satu Desa lokus stunting juga mengalami penurunan dalam pelaksanaannya, terlihat lebih dari setengah tiap tahunnya yang mencerminkan hasil positif dari adanya program intervensi yang dilakukan. Testimoni pada masyarakat, seperti pernyataan Masyarakat 1 juga mencerminkan dampak positif pada tingkat individu serta mengindikasikan peningkatan kualitas kesehatan balita.

Edward A. Suchman dikutip dalam (Winarno, 2002) menjelaskan bahwa evaluasi program dimulai dengan mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, yaitu memahami apa yang menjadi isi dan tujuan program tersebut. Dalam konteks ini, efektivitas Program Jombang Berkadang dapat dinilai baik dalam mengurangi stunting berdasarkan data prevalensi dan testimoni masyarakat. Hal ini didukung oleh intervensi yang terstruktur serta pendanaan yang memadai, program Jombang Berkadang terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Jombang, yang terlihat dari pencapaian target tahunan, perencanaan berbasis kebutuhan lokal, dan variasi intervensi seperti Taman Pemulihan Gizi (TPG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar-OPD menjadi faktor pendukung utama keberhasilan karena partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting bukan hanya sekadar kehadiran fisik, tetapi juga meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, dan evaluasi keberhasilan, sebagaimana dijelaskan oleh teori (Cohen and Uphoff, 1977) yang menekankan empat variabel partisipasi tersebut, Partisipasi yang kuat dari masyarakat akan memperbesar kemungkinan tercapainya keberhasilan program karena masyarakat jadi merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang akan dicapai.

Pelaksanaan yang berjalan baik tersebut tetap terdapat tantangan yaitu konsistensi pelaksanaan dan rendahnya kesadaran masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan, serta diungkapkan juga oleh

masyarakat yang dimana terdapat kendala aksesibilitas dalam sosialisasi seperti jadwal kerja yang bertabrakan dan menyebabkan masyarakat menjadi kurang pemahamannya dalam pemanfaatan intervensi program. Dijelaskan bahwa evaluasi ini merekomendasikan strategi tambahan seperti pelatihan kader desa dan sosialisasi terkait kesadaran yang lebih intensif, untuk memastikan program mencapai tujuan pengurangan stunting secara berkelanjutan dan menyeluruh di masa depan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Program Jombang Berkadang telah efektif dalam menurunkan prevalensi stunting, sebagaimana tercermin dari pencapaian target 4,3% pada 2022 dan 2023 serta pengakuan positif dari masyarakat dan instansi terkait. Namun, efektivitas program belum merata di seluruh desa akibat partisipasi serta kesadaran masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar desa dan strategi sosialisasi yang lebih adaptif menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program ini secara berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan dampak baik yang lebih merata di seluruh wilayah Desa.

b) Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara yang dilakukan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan program ini terkait alokasi anggaran dana dijelaskan bahwa dana yang dikeluarkan mencapai Rp200 juta per desa, dengan minimal Rp20 juta untuk stunting, hal ini menunjukkan fleksibilitas dan prioritas pada penanganan stunting. Bappeda berupaya memastikan tidak ada kendala dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program, agar anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022, intervensi yang diberikan difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu Taman Pemulihan Gizi (TPG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Desa Keras menetapkan anggaran sebesar Rp15.000 per balita untuk TPG dan PMT dalam penanganan stunting. Meskipun nominalnya relatif kecil, penggunaan dana tersebut terbukti efisien karena mampu memberikan hasil nyata, yaitu penurunan jumlah kasus stunting di desa. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran yang tepat, ditambah dengan perencanaan dan pelaksanaan yang terarah, dapat menghasilkan dampak yang signifikan meski dengan dana yang terbatas. Efisiensi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada bagaimana dana tersebut dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam konteks Program Jombang Berkadang, pemanfaatan sumber daya dilakukan secara strategis bukan hanya melalui alokasi anggaran, tenaga kesehatan, dan kader desa, tetapi juga dengan menggunakan teknologi informasi. Pendistribusian intervensi penanganan stunting dilaksanakan melalui aplikasi nasional milik Kementerian Kesehatan, yaitu Sigizi Kebidanan dan Kesehatan Anak (SIGIZI KEKKA). Aplikasi ini membantu pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan, pemantauan status gizi, serta pencatatan data stunting dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi di seluruh wilayah serta digunakan untuk mencatat dan mengirimkan data stunting secara real-

time dari desa ke Dinas Kesehatan. Dengan begitu, intervensi seperti susu dan vitamin dapat disalurkan secara tepat sesuai dengan jumlah dan kondisi balita yang membutuhkan, hal ini juga mencerminkan efisiensi dalam alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Jombang Berkadang telah menunjukkan efisiensi yang baik, terutama dalam pengelolaan dan alokasi anggaran. Dana yang dialokasikan secara fleksibel hingga Rp200 juta per desa, dengan minimal Rp20 juta untuk intervensi stunting, dimanfaatkan dengan efektif di lapangan. Bahkan, di Desa Keras, anggaran sebesar Rp15.000 per balita mampu menghasilkan dampak nyata berupa penurunan jumlah kasus stunting bantuan melalui TPG dan PMT dan intervensi dari Dinas Kesehatan melalui penggunaan aplikasi Sigizi Kezka turut mendukung efisiensi dengan menyediakan data real-time, sehingga distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menghindari pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, efisiensi program tercermin dari kesesuaian antara input yang digunakan dan hasil yang dicapai dalam upaya penurunan stunting.

c) Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara, kecukupan program ini terlihat dari pelaksanaan intervensi yang dinilai cukup dalam memecahkan masalah stunting, Perencanaan intervensi dalam program penanganan stunting disusun berdasarkan usulan dari desa dan Dinas Kesehatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Pemerintah desa menilai bahwa program seperti Taman Pemulihan Gizi (TPG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah memberikan dampak nyata dalam penanganan stunting. Alokasi dana yang tersedia juga dinilai cukup, dan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Dari sisi penerima manfaat, masyarakat merasa bahwa intervensi yang diberikan sudah cukup membantu dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, terutama yang mengalami kekurangan gizi. Bantuan berupa makanan tambahan dan edukasi kesehatan dirasakan langsung manfaatnya oleh keluarga yang membutuhkan. Rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya program Taman Pemulihan Gizi (TPG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) masih menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan program ini. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh seberapa besar keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga gizi anak secara berkelanjutan. Artinya, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi faktor penting agar program benar-benar efektif dan berdampak jangka panjang.

Dalam pelaksanaan Program Jombang Berkadang, perumusan kebijakan dilakukan secara kolaboratif dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Dinas Kesehatan, dan Bappeda, kolaborasi yang erat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan dukungan penuh dari Bappeda telah memperkuat kualitas kebijakan dan pelaksanaannya. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam

percepatan penurunan stunting, sehingga dukungan lintas sektor menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Dengan perumusan kebijakan yang terencana, berbasis data, dan melibatkan banyak pihak, Program Jombang Berkadang menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat disusun secara strategis untuk menjawab masalah nyata di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam penanganan stunting dinilai telah memenuhi aspek kecukupan. Hal ini terlihat dari alokasi dana yang memadai, serta pemanfaatan dana tersebut yang difokuskan untuk kegiatan seperti Taman Pemulihan Gizi (TPG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pemerintah desa menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri merasa intervensi yang diterima cukup membantu, khususnya bagi keluarga yang secara ekonomi terbatas.

d) Perataan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mencapai pemerataan secara menyeluruh Bappeda menyatakan bahwa Program penanganan dan pencegahan gizi buruk dan stunting ini merupakan kebijakan menu wajib sebagaimana dijelaskan Bappeda, hal ini dilakukan untuk memastikan semua desa mengimplementasikan program stunting agar mendapatkan anggaran serta mendukung perataan intervensi. Setelah implementasi merata sudah terlaksana di seluruh desa maka anggaran dan intervensi yang di distribusikan juga harus disesuaikan dengan desa, sistem pengumpulan data terintegrasi melalui posyandu, puskesmas, dan Dinas Kesehatan, serta penggunaan aplikasi Sigizi Kezka, memastikan distribusi bantuan sesuai dengan prevalensi stunting. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat pemerataan, meskipun keberhasilan bergantung pada akurasi data dan kapasitas desa.

Program ini menunjukkan pemerataan yang baik dalam penanganannya, proses penanganan tersebut juga mencerminkan aspek pemerataan, di mana setiap desa yang memiliki kasus stunting mendapat perhatian dan intervensi. Bantuan berupa susu, vitamin, dan makanan tambahan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan juga berdasarkan data valid yang dihimpun melalui sistem pelaporan dari posyandu ke desa dan diteruskan ke puskesmas serta Dinas Kesehatan. Distribusi bantuan di Desa melalui TPG dan PMT di Desa juga dilakukan secara merata dan berbasis dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga program ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan adil dan tepat sasaran.

Penanganan kasus stunting di desa dilakukan secara terstruktur, dimulai dari deteksi awal oleh posyandu, verifikasi data oleh puskesmas di tingkat desa, hingga distribusi bantuan yang langsung dan tepat sasaran. Pelaksanaan ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor yang baik serta respons cepat terhadap temuan di lapangan, sehingga program dapat berjalan efektif sesuai dengan perencanaan. Hal ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang terorganisir dengan baik, mulai dari tenaga kesehatan, dana desa, hingga sistem pelaporan melalui aplikasi. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, dan dinas kesehatan memperlihatkan bagaimana prosedur kerja dijalankan secara berjenjang dan terencana. Respons cepat

terhadap temuan di lapangan menunjukkan bahwa setiap langkah program telah dirancang agar tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas Program Jombang Berkadang menunjukkan tingkat pemerataan yang baik dalam distribusi manfaat, dengan menjadikan intervensi stunting sebagai menu wajib bagi seluruh desa untuk memastikan pelaksanaan program secara merata. Distribusi bantuan dan anggaran telah disesuaikan dengan tingkat prevalensi stunting melalui sistem data terintegrasi dari posyandu, puskesmas, dan dari Dinas Kesehatan melalui aplikasi Sigizi Kezka.

e) Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa responsivitas merupakan kriteria penting dalam evaluasi kebijakan, karena sekalipun suatu kebijakan dinilai efektif, efisien, mencukupi, dan adil, namun tetap dianggap gagal jika tidak mampu menjawab kebutuhan nyata dari kelompok sasaran yang seharusnya memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Bappeda menyatakan bahwa data prevalensi stunting dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan dampak positif terhadap penurunan kasus, yang dinilai sebagai hasil dari perencanaan program yang matang serta koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif. Testimoni dari Masyarakat 1 dan 2 menunjukkan bahwa bantuan diterima dalam waktu singkat, yakni sekitar dua hari setelah proses verifikasi, yang mencerminkan tingkat responsivitas yang baik dalam pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan Program Jombang Berkadang, kebijakan ini menunjukkan bahwa telah dijalankan melalui mekanisme distribusi yang cepat dan tanggap terhadap kondisi di lapangan. Hal ini menjadi bukti bahwa upaya penanganan stunting tidak hanya direncanakan dengan baik, tetapi juga mampu diimplementasikan secara responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa turut menilai bahwa intervensi TPG dan PMT yang diberikan selama program berlangsung sudah cukup membantu masyarakat, ditambah distribusi bantuan oleh Dinas Kesehatan seperti susu dan vitamin dinilai sangat membantu masyarakat yang kekurangan. Selama pelaksanaan program ini tetap muncul suatu tantangan yaitu dari sisi kesadaran masyarakat, khususnya dalam pola asuh dan penanganan stunting di tingkat keluarga. Pemerintah desa mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua yang menganggap anaknya sehat hanya karena terlihat aktif dan tidak tampak sakit. Padahal, setelah dilakukan pengukuran, anak tersebut masuk dalam kategori stunting. Dinas Kesehatan juga menambahkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program penanganan stunting terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya dalam mengenali dan menangani stunting sejak dini dan sebagai strateginya Dinas Kesehatan pernah mendatangkan dokter anak dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat terkait. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu hambatan dalam menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang, karena pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan peran aktif keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program Jombang Berkadang dalam penurunan dan pencegahan gizi buruk atau stunting ini sangat di dukung oleh pemerintah dengan diberikannya intervensi secara cepat dan melalui proses yang singkat, karena melalui program ini dinilai memberikan dampak positif terhadap penurunan kasus stunting. Bantuan yang diberikan dinilai sangat cukup dalam pelaksanaannya, namun kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap stunting masih dinilai sangat kurang. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam penurunan angka stunting dalam penanganan maupun pencegahannya.

f) Ketepatan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program telah memberikan intervensi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan, karena program ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lokal Jombang dan didukung oleh anggaran yang memadai serta keberlanjutannya melalui anggaran lain.

Pemerintah desa menilai bahwa bentuk bantuan yang diberikan sudah tepat, baik dari sisi jenis bantuan, waktu penyaluran, maupun kepada siapa bantuan itu diberikan. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari Sekretaris Desa, yang menjelaskan bahwa program ini sangat membantu warga, terutama bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Artinya, pemerintah desa melihat langsung bahwa program intervensi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dukungan terhadap program juga diperkuat oleh data grafik penurunan jumlah anak stunting di Desa Keras selama tiga tahun, yang menunjukkan hasil cukup signifikan. Dari tahun 2022 yang mencatat 100 anak stunting, angka tersebut terus menurun menjadi 43 di tahun 2023, hingga hanya tersisa 20 anak stunting pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di desa sudah berjalan sesuai target, dan tepat dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan. Selain dari pihak desa, masyarakat juga merasakan langsung manfaatnya. Masyarakat mendapatkan manfaat dari program bantuan seperti susu, vitamin dari Dinas Kesehatan dan makanan tambahan dari Desa yang sangat membantu meringankan beban keluarga yang penghasilannya terbatas. Hal ini menegaskan bahwa program benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan dan bukan hanya formalitas.

Dalam pelaksanaan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing, evaluasi menunjukkan hasil yang positif, program ini terbukti berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten Jombang melalui berbagai intervensi seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi yang tepat sasaran, implementasi yang tidak berhasil bisa terjadi ketika kebijakan sudah dilaksanakan sesuai rencana, tetapi kondisi eksternal justru tidak mendukung keberlanjutannya. Hal ini tampak pada Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing, program tersebut awalnya berjalan efektif dan berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten Jombang, keberlanjutannya tidak diteruskan secara penuh setelah terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah. Program yang sebelumnya memiliki pendanaan khusus melalui anggaran Jombang Berkadang akhirnya hanya dilanjutkan sebagian oleh Dinas Kesehatan. Sayangnya, kebijakan tersebut tidak dilanjutkan secara penuh,

Bappeda menyarankan agar kebijakan di masa depan bisa dirancang lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Penyesuaian secara terus-menerus dianggap penting agar hasil dari intervensi tidak berhenti pada jangka pendek, tetapi bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program dinilai tepat Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing memiliki dampak yang positif terhadap penurunan angka stunting di masyarakat. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lokal, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, serta memberikan intervensi yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, Program Jombang Berkadang telah memberikan dampak yang positif dalam upaya penanganan stunting. Meski hasilnya sudah terlihat, masih ada beberapa hal yang perlu diperkuat seperti keberlanjutan program, kerja sama antar sektor, dan pendekatan yang lebih menyeluruh. Hal ini penting agar program tidak hanya membawa hasil dalam waktu singkat, tetapi juga benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara terus-menerus.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya terkait Evaluasi Dampak Kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang (Studi Evaluasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022) dapat diambil kesimpulan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn dalam (Nugroho, 2014) yang dengan merujuk 6 indikator yaitu sebagai berikut

1. Efektivitas

Pada indikator efektivitas, kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang dinilai sudah efektif dalam pelaksanaannya yang menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka stunting, sesuai dengan tujuan dan nilai dari kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan melalui Kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang. Secara keseluruhan efektivitas kebijakan program ini dinilai belum optimal, karena partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam penerimaan edukasi gizi sehingga menyebabkan penanganan anak stunting dan gizi buruk dalam lingkup keluarga masih terkendala. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah cukup efektif dalam menanggulangi gizi buruk dan stunting tetapi partisipasi masyarakat yang kurang dan membuat indikator evaluasi ini dapat dikatakan belum optimal secara keseluruhannya.

2. Efisiensi

Pada indikator efisiensi, kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang dinilai sudah optimal dalam pelaksanaannya, hal ini dilihat dari segi pencapaian tujuan

program dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran, alokasi anggaran, serta efisiensi penggunaan anggaran di Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Intervensi dari Dinas kesehatan yang dilakukan juga berbasis data real-time melalui aplikasi Sigizi Kezka, sehingga distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menghindari pemborosan sumber daya.

3. Kecukupan

Pada indikator kecukupan, kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang sudah berhasil dalam menangani masalah stunting, intervensi yang diberikan dinilai cukup dalam penanganan dan pencegahannya karena dalam perencanaannya bappeda melakukan kordinasi dan sinkronasi data dengan dinas kesehatan serta sudah disesuaikan lagi oleh Desa dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, secara keseluruhan kecukupan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap intervensi yang diberikan.

4. Perataan

Pada indikator perataan, kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang dinilai sudah optimal Program Jombang Berkadang menunjukkan tingkat pemerataan yang baik dalam distribusi manfaat, dengan menjadikan intervensi stunting sebagai menu wajib bagi seluruh desa untuk memastikan pelaksanaan program secara merata dan perataan program bantuan TPG dan PMT dilakukan oleh desa langsung menyentuh ke masyarakat yang membutuhkannya serta dalam perataan distribusi intervensi yang diberikan oleh dinas kesehatan menyesuaikan dengan data yang dimana data ini valid adanya telah disesuaikan dengan tingkat prevelensi stunting per kecamatan/Desa melalui aplikasi kementerian sigizi kezka dan telah terintegrasi oleh posyandu dan puskesmas desa setaip bulannya.

5. Responsivitas

Pada indikator responsivitas, respon pemerintah dalam kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang dinilai belum optimal sepenuhnya, jika dinilai dari respon pemerintah dalam pendistribusian intervensi, pemeerintah menunjukkan responsivitas yang baik dan cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Namun jika dinilai secara keseluruhan, program belum sepenuhnya optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya intervensi gizi dan penanganan yang tepat dalam kasus gizi buruk maupun stunting, banyak masyarakat yang salah mengartikan kedua hal ini masyarakat atau ibu dari anak yang terindetifika menganggap anaknya tidak memiliki gejala sakit yang menghambat kegiatan sehari-hari, oleh karena itu penanangan ibu dalam program ini tidak optimal dan kurang tepat yang menyebabkan program ini terhambat dalam penanganan dan pencegahan gizi buruk atau stunting nya. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah yang sangat responsif dalam pelaksanaannya

namun kesadaran dan pemahaman ibu yang kurang dan membuat indikator evaluasi ini dapat dikatakan belum optimal secara keseluruhannya.

6. Ketepatan

Pada indikator ketepatan secara keseluruhan, kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Jombang sudah memberikan dampak positif dan optimal dalam penanganan stunting. Program ini dinilai telah tepat sasaran karena disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun belum optimal dari sisi keberlanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan yang lebih menyeluruh masih perlu diperkuat agar program tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga mampu memberikan pengaruh berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup anak dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah berjalan dengan baik namun tetap diperlukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan agar hasil intervensi tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas hidup anak dan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam penurunan angka stunting, masih terdapat beberapa kendala dalam beberapa aspek maka diberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program serupa di masa yang akan datang. Berikut beberapa saran tersebut :

1. Pada aspek efektivitas, dalam pelaksanaan kebijakan program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam penurunan angka stunting belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam penerimaan edukasi gizi yang terkendala aksesibilitas dan waktu. Dalam hal tersebut jadwal penyuluhan sebaiknya dibuat lebih fleksibel agar ibu balita yang bekerja tetap bisa terlibat serta perlu ditingkatkan lagi sosialisasi edukasi gizi secara rutin dengan metode yang lebih kreatif dan mudah dipahami seperti memberikan video edukasi yang dapat dilihat di rumah atau kunjungan langsung ke rumah bagi masyarakat yang terkendala dalam akses dan waktu.
2. Pada aspek kecukupan, dalam pelaksanaannya kebijakan program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam penurunan angka stunting belum optimal karena terdapat masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya program ini. Dalam hal itu, pemerintah Desa dapat memanfaatkan media komunikasi lokal, seperti grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi secara berkala sehingga masyarakat semakin familiar dengan pentingnya program penanganan dan pencegahan ini.
3. Pada aspek responsivitas, dalam pelaksanaannya kebijakan program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam penurunan angka stunting belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya intervensi gizi dan penanganan yang tepat dalam kasus gizi buruk maupun stunting. Banyak masyarakat, khususnya ibu dari anak yang teridentifikasi stunting masih salah

mengartikan kondisi ini. Mereka kerap menganggap anaknya tidak memiliki gejala sakit yang menghambat aktivitas sehari-hari, dan pemerintah Desa dapat mengadakan kegiatan penyuluhan yang lebih terfokus pada penjelasan dampak jangka panjang stunting, misalnya dengan menyampaikan informasi bahwa meskipun anak terlihat sehat, pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak tetap terganggu. Selain itu, perlu dilakukan kunjungan rumah secara rutin untuk memastikan orang tua memahami pentingnya intervensi gizi dan mau mengikuti anjuran yang diberikan serta dapat lebih sering melibatkan dokter dalam proses edukasi karena keterlibatan tersebut akan membantu meningkatkan kepercayaan dan mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti program.

4. Pada aspek ketepatan, dalam pelaksanaannya kebijakan program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing dalam penurunan angka stunting belum optimal dari sisi keberlanjutan karena dihentikan seiring adanya pergantian tatanan pemerintahan. Dalam hal tersebut, diharapkan pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu program, tetapi juga menyiapkan alternatif program penanganan lain yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal kebijakan yang lebih mengikat sehingga program tetap berjalan meskipun ada pergantian kepemimpinan. Selain itu, untuk menjaga agar program tetap relevan dalam jangka panjang dibutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan serta inovasi, misalnya dengan memberikan pelatihan kepada kader Desa dan terus melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat agar pemahaman gizi dan pola asuh tetap berkembang.

Referensi

- Anderson, J. E. (1979). *Public policy-making*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Cohen and Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. Cornell University.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Rosda.
- Nugroho. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.